



ASPIRASI DAPIL

DPR Dinilai Terlalu Terburu-buru

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dinilai terlalu terburu-buru ingin mengimplementasikan hak untuk mengusulkan program pembangunan di daerah pemilihan. Padahal, masih ada sejumlah mekanisme teknis yang sebenarnya belum matang dibahas dan dirumuskan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo, Selasa (16/6), di Jakarta, mengatakan, DPR terlalu memaksakan diri ingin memasukkan program-program pembangunan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"Padahal, tidak mudah merumuskan implementasi hak tersebut, jadi tidak mesti (dianggarkan) pada 2016. Masalahnya, kita saja belum tuntas membicarakan mekanisme kontrolnya agar program ini tidak dimanfaatkan untuk korupsi, tetapi sudah diputuskan," kata Arif yang juga anggota Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan Program Pembangunan Dapil.

Ia mengatakan, tim tersebut telah mengadakan rapat empat sampai lima kali sejak masa sidang ketiga, Maret-April lalu, untuk merumuskan mekanisme teknis penerapan pengusulan program pembangunan. Draf peraturan yang dirancang sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. Baleg sudah mulai bekerja membahas rancangan peraturan itu sejak Kamis (11/6).

Namun, menurut Arif, sebenarnya belum semua poin dibahas matang dan rinci. "Selain mekanisme pengawasan, juga terkait dengan mempersepsikan apa yang disebut pembangunan proporsional dan adil. Hampir semuanya tidak dibahas dengan matang. Saya kira ada satu skenario tersembunyi," kata Arif.

Terkait pembangunan yang adil, ia menjelaskan, program pembangunan dapil yang diusulkan anggota DPR berpotensi memperbesar ketimpangan pembangunan antardaerah. Sebagai contoh, ada 87 anggota DPR periode 2014-2019 di Jawa Timur, sementara hanya ada 10 anggota DPR di Papua.

"Kalau DPR ingin hasilnya adil, jangan tetapkan pagu Rp 20 miliar setiap daerah. Seharusnya



Tidak mudah merumuskan implementasi hak tersebut, jadi tidak mesti (dianggarkan) pada 2016.

Arif Wibowo

dihitung dulu, ada formulanya. Kapasitas per kabupaten/kota dalam daerah pemilihan itu berbeda-beda. Kesenjangan antarwilayah harus diukur," katanya.

Bahas formula

Wakil Ketua Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan Program Pembangunan Dapil Hendrawan Supratikno berencana mengusulkan formula untuk merumuskan pagu anggaran program per daerah. Hal tersebut diharapkan bisa mengatasi masalah kesenjangan pembangunan antardaerah.

"Jadi, akan ada Indeks Netralisasi Kesenjangan (INK). Antara dapil di Jawa dan Papua tidak akan ditetapkan pagu anggaran yang sama, tetapi akan disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan setiap dapil," kata politisi PDI-P itu.

Hendrawan mengatakan, pagu anggaran ke depan tidak bisa ditetapkan sama rata seperti rencana sementara ini, yakni Rp 20 miliar. "Nanti dibuat seperti formula dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Hal ini akan dibicarakan lagi di Badan Legislasi saat pembahasan draf peraturan," ujar Hendrawan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Rabu ini, tim mekanisme berencana bertemu Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua lembaga itu diharapkan bisa membantu mengawasi penerapan usulan program pembangunan dari anggota.

"Semua usulan program nanti harus ditembuskan ke KPK dan BPK, jadi jangan anggap DPR garong dengan mengusulkan program pembangunan," kata Ketua Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan Program Pembangunan Dapil itu.

(AGE/NTA)